

STRATEGI PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN (STUDI KASUS KOTA BANDUNG)

¹Ernady Syaodih, dan ²Weisyaguna

^{1,2} Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40132
E-mail : ernadysyaodih@yahoo.com

Abstrak. Kota Bandung adalah Kota Besar yang seharusnya memperhatikan Ruang Terbuka Hijau yang sangat penting bagi peningkatan kualitas kota, sarana rekreasi, arsitektur kota, ruang publik, sarana olah raga, ruang komunikasi sosial, penghilang stress, pengendali banjir, cadangan air, peningkat citra kota dsb. Namun dalam kenyataannya Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung dari tahun ke tahun semakin berkurang, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai problema bagi masyarakat seperti banjir, polusi, udara panas, masalah sosial dsb. Beranjak dari berbagai masalah di atas maka perlu diteliti masalah Ruang Terbuka Hijau berikut solusinya sehingga rumusan penelitian ini adalah “apa masalah RTH di kota Bandung dan bagaimana strategi mengatasinya?”

Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi persoalan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung serta merumuskan strategi-strategi untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode ini digunakan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dari kondisi nyata di lapangan. Metode Analisis yang digunakan menggunakan metode SWOT.

Hasil penelitian dalam pengembangan RTH terutama adalah keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan sarana dan prasarana pemeliharaan serta keterbatasan anggaran. Disamping itu juga terdapat kendala dalam kualitas perencanaan, serta sinergitas antar dinas, masyarakat dan swasta.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Strategi, Kota

1. Pendahuluan

Bandung merupakan kota besar yang berfungsi sebagai ibukota propinsi, dulu Kota Bandung merupakan kota taman karena berada di pegunungan dan didominasi ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau pada masa kolonial didisain untuk menyatu dengan penataan kawasan perumahan, jalur hijau tepi sungai, ruang terbuka hijau tepi sungai, taman-taman rekreasi seperti kebun binatang, taman lalu lintas, jalur hijau disepanjang tepi jalan seperti jalan Cipaganti, Cihampelas, Pasir Kaliki, Jalan Dago, Pajajaran Jalan Riau, serta jalan-jalan utama lainnya dilengkapi dengan jalur hijau. Keindahan penataan Kota Bandung dahulu diibaratkan sebagai Kota Paris sehingga muncul istilah Paris Van Java.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah ditetapkan bahwa suatu kota harus memiliki RTH minimal 30% dari luas kota. Dalam kenyataannya Kota Bandung saat ini memiliki RTH kurang dari 10%, dan yang lebih memprihatinkan adalah adanya kecenderungan yang terus menurun dari luas RTH

tersebut. Pengurangan Ruang terbuka Hijau tersebut berdampak terhadap meningkatnya potensi banjir, berkurangnya cadangan air, meningkatnya suhu udara, berkurangnya kenyamanan kota dsb. Hal utama dari berkurangnya RTH di Kota Bandung adalah kurang berpihaknya Pemerintah Kota Bandung terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota cenderung mengutamakan kegiatan bisnis dan pembangunan perumahan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi kota. Disisi lain ada keenganan dari Pemerintah Kota untuk mengeluarkan dana APBD bagi pengadaan RTH yang tidak dinilai strategis bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Apabila hal tersebut dibiarkan terus terjadi maka tidak menutup kemungkinan Kota Bandung akan kehilangan Ruang Terbuka Hijau yang berakibat munculnya berbagai mala petaka bagi warga Kota Bandung dan sekitarnya.

Beranjak dari berbagai masalah di atas maka perlu diteliti masalah Ruang Terbuka Hijau berikut solusinya sehingga rumusan penelitian ini adalah “apa masalah RTH di kota Bandung dan bagaimana strategi mengatasinya?”

Maksud Penelitian ini adalah untuk mencari solusi bagi penyelesaian persoalan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi persoalan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung serta merumuskan strategi-strategi untuk mengatasinya.

2. Metode Penelitian

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode ini digunakan agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dari kondisi nyata di lapangan . Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan tidak hanya berkenaan dengan fakta-fakta, tetapi juga kegiatan sosial, persepsi, kepercayaan, dan pemikiran; yang diperoleh melalui hubungan interaktif, tatap muka dengan sumber data atau informan terpilih. Hal itu sesuai dengan pendapat McMillan, James H and Schumacher, Sally. (2001: 395)

Interactive qualitative research is inquiry in which researchers collect data in face to face situations by interacting with selected persons in their settings (field research). Qualitative research describes and analyzed people’s individual and collecteve social actions, beliefs, thoughts, and perceptions.

Melalui penggunaan penelitian kualitatif dimungkinkan dikemukakan pertanyaan-pertanyaan yang luas dan umum tentang pandangan-pandangan informan. Melalui interaksi langsung-tatap muka hal-hal umum tersebut dapat digali sampai kepada hal-hal yang detil atau spesifik, sehingga diperoleh kajian yang mendalam, seperti dikemukakan oleh Creswell, John W. 2008: 46)

Qualitative research is a type of educational research in which the researcher relies on the views of participants; asks broad, general questions, collects data consisting largely of words (or text) from participants; describes and analyzes these words for themes, and conducts the inquiry in a subjective, biased manner.

Penelitian yang akan dilakukan bersifat studi kasus, selain diharapkan diperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh dan mendalam, tetapi juga bersifat alamiah, sebagaimana adanya di lapangan dalam konteks situasi nyata, tanpa pengaruh perlakuan-perlakuan khusus. Penelitian demikian dapat dicapai dengan pendekatan penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh McMillan, James H (2008: 273)

2.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kota Bandung memiliki luas 16,729 Ha, 10,03% diantaranya adalah Ruang terbuka hijau dengan luas 1,678.27 Ha atau 10,03%. Jenis Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Bandung adalah sebagai berikut Taman Kota dan Kebun Bibit, RTH Pemakaman, Tegangan Tinggi, Sempadan Sungai, Jalur Hijau Jalan, Sempadan Kereta Api, Hutan Konservasi, Penanganan Lahan Kritis dsb.

Tabel 1. Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung Tahun 2010

Ruang Terbuka Hijau	Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung (16.792 Ha)		Keterangan
	Ha	%	
Taman Kota dan Kebun Bibit	218,97	1.31	Tahura Djuanda dan PLTA Dago Bengkok
RTH Pemakaman	148,14	0.88	
Tegangan Tinggi	10,17	0.06	
Sempadan Sungai	18,31	0.11	
Jalur Hijau Jalan	176,91	1.06	
Sempadan Kereta Api	6,42	0.04	
Hutan Konservasi	4,12	0.02	
Penanganan Lahan Kritis	416,92	2.46	
Jumlah I	999.06	5.97	
Potensi RTH lainnya	562,46	3.36	
-RTH Perkantoran			
-RTH Pendidikan			
-RTH KAWASAN Militer			
-RTH Kawasan Industri			
-RTH Kawasan Permukiman			
-RTH di Lahan dari Bagian Aset			
-Potensi RTH lainnya			
Penambahan RTH dari penanaman tanaman produktif	116,75	0,70	
Jumlah II	679,21	4.06	
Jumlah I dan II	1,678.27	10,03%	

Keterangan : Luas wilayah Kota Bandung (PP No. 6/1987) = 16,729 Ha Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Tahun 2010
 $1678.27/16.729 \times 100\% = 10,03\%$

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau sudah diatur dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, khususnya pasal 43- 47. Pengelolaan Ruang Terbuka hijau berada di kewenangan Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang terdiri atas 4 Bidang yakni Bidang Pemakaman, Bidang Pertamanan, Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota, Bidang Dekorasi Kota dan Reklame, 4 bidang tersebut dipimpin oleh satu kepala dinas yang dibantu oleh sekretaris kepala dinas. Bidang-bidang tersebut juga didukung oleh Unit Pengelolaan Terpadu (UPT).

Masalah utama dalam penataan, pemeliharaan dan pengembangan RTH di Kota Bandung adalah keterbatasan jumlah SDM khususnya petugas lapangan, mengingat luasnya kota Bandung dan kompleksnya permasalahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. Disamping keterbatasan Jumlah SDM, masalah penataan Ruang terbuka hijau terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana pemeliharaan. Kedua hal tersebut juga terkendala oleh keterbatasan anggaran untuk penataan Ruang Terbuka Hijau.

Rata-rata anggaran untuk pemeliharaan RTH sekitar 1,5 M sedangkan kebutuhan sekitar 15 M sehingga data yang ada hanya mampu untuk kegiatan pemeliharaan saja sedangkan untuk pengembangan sangat tidak memungkinkan. Kota Bandung memiliki kebijakan untuk mengembangkan RTH public, namun dalam implementasinya seringkali terdapat perbedaan antara kebijakan dan realisasi yang disebabkan kurang pemahannya masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau. Hal tersebut juga mendorong penyimpangan kebijakan pengembangan RTH public melalui rendahnya penerapan kebijakan BCR di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena kurang ketatnya pengeluaran izin dan pengawasan yang dilakukan oleh Distarcip.

Kendala utama masalah ini juga terletak pada keterbatasan SDM khususnya petugas lapangan. Untuk mencapai luas RTH 20% dari luas administrasi Kota Bandung perlu dilakukan pembebasan lahan. Namun hal ini juga terkendala oleh dana pembangunan yang terbatas. Pemerintah sesungguhnya dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui pengembangan wakaf tanah untuk Ruang Terbuka Hijau dan Peran serta Swasta dalam Skema CSR.

Pemberdayaan masyarakat dalam menata dan mengembangkan RTH ini perlu pendekatan dan sosialisasi dari pemerintah secara terus menerus. Kontribusi Swasta dalam pengembangan RTH dapat signifikan seperti yang dilakukan BNI di persimpangan Sukagalih dan Dr. Djunjunan yang mampu merubah ruang terbangun menjadi Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai ATM. Beberapa perusahaan juga sudah berpartisipasi dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau seperti Biofarma, Astra untuk penghijauan ex TPA Pasir Impun. Pemerintah juga berupaya mengembangkan RTH melalui izin lokasi yang mensyaratkan pengembangan RTH seperti Izin pengadaan Tower Telekomunikasi dengan syarat harus menghijaukan lahan disekitarnya.

Namun dalam pengembangan RTH melalui persyaratan perizinan, seringkali kurang pengawasan dan pengendalian seperti banyak terjadi di lahan real estate dan Perumnas, dimana RTH/Taman/green belt yang sudah dibangun kemudian berubah fungsi menjadi bangunan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota khususnya Dinas Keuangan dan Aset Daerah. Dinas tersebut bertanggungjawab dalam

pengelolaan asset khususnya dalam mensertifikasi lahan-lahan yang telah diserahkan oleh swasta/pengembang sebagai syarat untuk menyerahkan fasos dan fasum kepada Pemerintah Kota. Pengurangan RTH juga banyak terjadi oleh pihak Developer yang belum memiliki ijin namun sudah melakukan kegiatan dilapangan dan seringkali dalam pengembangan lahan seperti pembangunan jalan, pihak developer dengan sengaja menebang pohon yang ada dan menggunakan Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Pemko.

Pemerintah Kota telah berupaya memperluas RTH melalui penghijauan atau pengembalian fungsi taman seperti Taman yang digunakan untuk SPBU. Menyikapi keterbatasan sumberdaya, pemerintah juga bekerjasama dengan pihak swasta dalam pemeliharaan beberapa Taman/RTH.

Berikut akan dirumuskan hasil analisis SWOT dan rumusan strategi dalam table berikut:

Analisis Swot dan Perumusan Strategi

	Kekuatan	Kelemahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Lahan • Peran serta masyarakat • Kemampuan Pembiayaan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan lahan • Keterbatasan SDM • Keterbatasan infrsaturuktur • Lemahnya kemampuan Pemko memberdayakan Peran serta masy • Sinkronisasi Program • Sosialisasi Program • Implementasi Rencana Tata Ruang dalam program RTH
Peluang	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan PemKo dalam RTRW • Peran Swasta (CSR) • Bantuan Pemerintah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan ketersediaan lahan yang ada sebagai Ruang Terbuka Publik • Memanfaatkan peluang kerjasama pemerintah – swasta dan masy dalam pengadaan RTH dan pemeliharaan • Medorong pencapaian target UU Penataan Ruang dalam pengadaan RTH 30% melalui peningkatan anggaran pengadaan ruang untuk RTH • Mendorong bantuan pemerintah pusat dalam pengadaan RTH • Mendorong peran yang lebih besar swasta untuk berperan serta dalam pengadaan RTH • Meningkatkan peran pemerintah pusat dalam pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi keterbatasan lahan RTH dengan bantuan pemerintah pusat dan peran serta swasta • Mendorong peran pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kuantitas SDM dan Infrastruktur • Mendorong peran pemerintah pusat dalam meningkatkan kemampuan Pemko dalam pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengadaan dan pengelolaan RTH • Mendorong peran pemerintah pusat dalam sinkronisasi dan sosialisasi Program RTH • Mendorong peningkatan pengawasan pemerintah pusat dalam Implementasi Rencana Tata Ruang dalam program RTH

Ancaman	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk meningkat cepat • Kebutuhan lahan kws terbangun tinggi • Minat investasi tinggi • Kegiatan ekonomi meningkat pesat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah dalam pengadaan lahan dan pengelolaan RTH • Mengendalikan pertumbuhan penduduk • Mengendalikan alih fungsi lahan terbuka menjadi terbangun • Mengembangkan lahan terbangun dengan BCR Rendah dan ketinggian bangunan tinggi dan beratap hijau • Mengarahkan kegiatan investasi yang mendukung perluasan dan pengelolaan RTH, dengan bangunan ber BCR rendah • Mengarahkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan bangunan vertical agar dapat mempertahankan dan mendorong lahan hijau lebih luas • Mendorong implemetasi program dan RTRW dalam mengembangkan RTH guna mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan investasi.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung berada di kewenangan Dinas Pemukiman dan Pertamanan yang terdiri atas 4 Bidang yakni Bidang Pemakanan, Bidang Pertamanan, Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota, Bidang Dekorasi Kota dan Reklame, 4 bidang tersebut dipimpin oleh satu kepala dinas yang dibantu oleh sekretaris kepala dinas. Bidang-bidang tersebut juga didukung oleh Unit Pengelolaan Terpadu (UPT).

Masalah utama dalam penataan, pemeliharaan dan pengembangan RTH di Kota Bandung adalah keterbatasan jumlah SDM khususnya petugas lapangan, mengingat luasnya kota bandung dan kompleksnya permasalahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. Disamping keterbatasan Jumlah SDM, masalah penataan Ruang terbuka hijau terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana pemeliharaan. Kedua hal tersebut juga terkendala oleh keterbatasan anggaran untuk penataan Ruang Terbuka Hijau.

Pemerintah Kota Bandung memiliki kebijakan untuk mengembangkan RTH publik, namun dalam implementasinya seringkali terdapat perbedaan antara kebijakan dan realisasi yang disebabkan kurang pahamnya masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau, sehingga terjadi penyimpangan kebijakan pengembangan RTH publik melalui penetapan BCR dengan realisasi di lapangan.

Disamping faktor masyarakat, masalah penyimpangan kebijakan RTH Publik adalah kurang ketatnya pengeluaran izin dan pengawasan yang dilakukan oleh Distarcip. Kendala utama masalah ini juga terletak pada keterbatasan SDM khususnya petugas lapangan.

Pemerintah Kota juga telah berupaya memperluas RTH melalui penghijauan atau pengembalian fungsi taman yang digunakan untuk SPBU. Menyikapi keterbatasan sumberdaya, pemerintah juga bekerjasama dengan pihak swasta dalam pemeliharaan beberapa Taman/RTH.

Peran serta masyarakat cukup kuat dalam mengembangkan dan memelihara RTH, namun pemerintah masih kurang memberdayakan masyarakat dalam pengembangan RTH.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan kualitas perencanaan RTH dan mengintegrasikan dengan rencana tata ruang dan rencana strategis lainnya
- Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan anggaran pembangunan untuk pemeliharaan dan pengembangan RTH
- Pemerintah Kota Bandung perlu mensosialisasi program penataan Ruang Terbuka hijau melalui berbagai media cetak, elektronik, web site, sekolah, mesjid, ormas dsb
- Dinas Pertamanan perlu menambah tenaga lapangan untuk pengawasan, pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat serta bekerjasama dengan masyarakat dan swasta
- Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder, di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, antar dinas, kecamatan dan kelurahan, agar penataan RTH dapat terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya.
- Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan Peran Kelurahan, RW, RT dan PKK untuk pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan taman di lingkungannya masing-masing
- Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat, lembaga pendidikan, mesjid dan perusahaan untuk pemeliharaan dan pengembangan Taman
- Pemerintah Kota Bandung perlu menghimpun dana dari masyarakat untuk pemeliharaan dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau
- Pemerintah Kota Bandung perlu menyelenggarakan berbagai kegiatan atau lomba penghijauan antar kelurahan yang melibatkan seluruh masyarakat, pendidikan, mesjid, perusahaan dsb

4. Daftar Pustaka

- Carpenter, Phillips L., dkk. 1975. *Plant in the Landscape*. San Fransisco: Wh. Freeman and Company.
- Creswell, John W. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson-Merril Prentice Hall.
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design*. Thousand Oaks, Sage Publication.
- Garret Eckbo. 1988. *Urban Landscape Design, Element and to the Concept, Graphic*. Sha Publishing Co Ltd.

- Hester, R.T. 1975. *Neighborhood Space*. Husting Son and Rose.
- Hill, WF. 1995. *Landscape Handbook for The Tropics*. USA: Packard Publishing Book.
- Laurie. M. 1975. *An Introduction to Landscape Architecture*. American Publisher.
- McMillan, James H. (2008). *Educational Research: Fundamentals for the Consumer*. Boston: Pearson.
- McMillan, James H. and Schumacher, Sally. (2001). *Research in Education. A Conceptual Introduction*. New York: Longman.
- Motloch, JL. 1991. *Introduction to Landscape Design*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Moleong, L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Roosda Karya.
- Muhadjir, Noeng (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito.
- Newton NT. 1971. *Design on the Land. (The Development of Landscape Architecture)*.
- Reid G.W. 1993. *From Concept to Form in Landscape Design*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Rubenstein, HM. 1968. *A Guide to Site and Environmental Planning*. John Walley & Sons, Inc.
- Rustam Hakim. 1988. *Unsur-Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rustam Hakim. 2003. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Simonds, J.O. 1997. *Landscape Architecture Third Edition*. New York: McGraw Hill Book.